

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai tingkat kemiskinan cukup tinggi. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 25,90 juta jiwa atau 9,36% dari jumlah penduduk Indonesia yaitu 280,73 juta jiwa. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 0,46 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,26 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023).

Kemudian data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2023, Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia menempati peringkat kedua sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia, yaitu sebesar 3.888,60 ribu penduduk. Dibandingkan pada September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 165,02 ribu penduduk, dengan kata lain persentase penurunannya mencapai 4,07% dalam kurun waktu 6 bulan (Badan Pusat Statistik, 2023) .

Kabupaten Sumedang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat memiliki penduduk miskin sejumlah 111.140 jiwa pada tahun 2023 angka

kemiskinan tersebut turun 7,46 % dimana pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumedang mencapai 120.100 jiwa (Hesty, 2023).

Dari data jumlah penduduk miskin di atas, dapat dipahami bahwa walaupun jumlah penduduk miskin di Indonesia dikatakan cukup tinggi, namun telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin secara cukup signifikan baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dari berbagai pihak baik secara individu, keluarga, komunitas, dunia usaha hingga sektor pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, salah satunya melalui program pemberdayaan masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah khususnya Kementerian Sosial dalam memberdayakan masyarakat diwujudkan melalui program Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE. KUBE merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. KUBE beranggotakan 5 sampai 20 Kepala Keluarga dari masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM). (Kementerian Sosial, 2019).

Ridwan Kamil dalam Teguh (2023) mengemukakan bahwa strategi penurunan angka kemiskinan di Jawa Barat dilakukan melalui tiga konsep terukur,

yaitu level miskin ekstrim diberi daya hidup dengan bantuan keuangan atau bantuan sosial. Level miskin tengah dengan agresivitas pembukaan lapangan kerja via investasi dan penguatan UMKM. Level miskin atas dilatih wirausaha dan diberi modal usaha. Strategi yang diterapkan di Provinsi Jawa Barat tersebut sejalan dengan program KUBE dimana masyarakat miskin dilatih wirausaha dan diberi modal usaha. Dalam hal ini, Jawa Barat juga merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menerapkan program KUBE.

Kabupaten Sumedang sebagai salah satu kabupaten yang responsif terhadap penanggulangan kemiskinan. PJ Bupati Sumedang Herman Suryatman dalam Rustandi (2023) mengatakan bahwa ada empat strategi untuk melakukan skema-skema percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Sumedang melalui intervensi APBD 2024, salah satunya yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan UMKM seperti pemberian sarpras UMKM, KUBE, UPPKA, bantuan ternak dan ikan serta pelatihan kewirausahaan.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sumedang tahun 2023, terdapat 46 KUBE yang tersebar di berbagai desa dan kecamatan di Kabupaten Sumedang. Tak terkecuali di Kecamatan Situraja, di kecamatan tersebut terdapat 9 KUBE yang tersebar di Desa Situraja sebanyak 2 (dua) kelompok, di Desa Malaka sebanyak 5 (lima) kelompok, dan di Desa Cikadu sebanyak 2 (dua) kelompok (Juwita, 2023).

Berdasarkan data tersebut, Desa Malaka telah berhasil menginisiasi pembentukan 5 KUBE, menjadikannya salah satu desa dengan jumlah KUBE

terbanyak di Kabupaten Sumedang. Proses pembentukan KUBE ini dimulai secara efektif pada bulan Januari 2023, yang melibatkan tahapan pengajuan dan pendataan anggota. Dalam hal ini, tercatat sebanyak 10 anggota di tiap kelompok telah didata untuk bergabung dalam KUBE, dengan jenis usaha pada sektor peternakan domba. Keberhasilan Desa Malaka dalam menginisiasi pembentukan sejumlah KUBE ini menunjukkan komitmen dan kerja keras mereka dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok.

Salah satu KUBE yang menarik perhatian peneliti adalah “Sumber Rezeki 1” di Desa Malaka, yang menjadi percontohan di Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang. Keberhasilan KUBE “Sumber Rezeki 1” sebagai kelompok percontohan tidak lepas dari dampak positif yang ditimbulkannya bagi anggotanya. Sebelumnya, masyarakat setempat tidak memiliki aktivitas ekonomi yang signifikan, namun karena adanya kelompok ini, mereka kini memiliki kesempatan untuk menghasilkan pendapatan secara rutin. Hal tersebut peneliti ketahui ketika peneliti melaksanakan praktikum komunitas di Desa Malaka pada bulan Oktober hingga Desember tahun 2023.

Secara konseptual, kemiskinan tidak hanya mencakup tema materi, tetapi juga memiliki dimensi sosial-psikologis yang meliputi kurangnya jaringan sosial dan struktur yang mendukung produktivitas. Dimensi ini mencerminkan kemiskinan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang menghalangi kesempatan dalam masyarakat. Faktor-faktor penghambat ini dapat dibagi menjadi internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari individu itu sendiri, seperti rendahnya tingkat pendidikan, sementara faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan luar individu.

Kedua faktor ini berperan penting dalam membatasi akses individu yang berada dalam kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraannya (Pinontoan, 2020).

Selain itu, dimensi kemiskinan dapat dilihat dari pendekatan keberfungsian sosial dapat menggambarkan karakteristik dan dinamika kemiskinan yang lebih realistis dan komprehensif. Suharto (2005) dalam Pinontoan (2020) menjelaskan bagaimana keluarga miskin merespons dan mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang terkait dengan situasi kemiskinannya. Selaras dengan pekerjaan sosial, yakni *“to help people to help themselves”*, pendekatan ini memandang orang miskin bukan sebagai objek pasif yang hanya memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang sering digunakannya dalam mengatasi berbagai permasalahan seputar kemiskinannya. Kemiskinan sebaiknya tidak dilihat hanya dari karakteristik si miskin secara statis, melainkan dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan masyarakat miskin dalam merespon kemiskinannya, termasuk efektivitas jaringan sosial (lembaga kemasyarakatan dan program-program anti kemiskinan setempat) dalam menjalankan fungsi sosialnya.

Pekerja sosial dalam menangani masalah kemiskinan dapat menggunakan metode pekerjaan sosial yakni *community development/community organization*. *Community development* adalah metode yang dapat dilakukan untuk membangun masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat tersebut dalam rangka meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, masyarakat terlibat secara aktif dalam mengelola dan mengorganisasikan segala potensi yang mereka miliki. Bekerja bersama masyarakat (*working with people*)

adalah prinsip utama dalam penerapan metode ini. Strategi-strategi yang digunakan dalam metode *community development*, sebagai upaya peningkatan dan pengembangan kapasitas masyarakat miskin tersebut adalah bagaimana strategi pemecahan masalah sebagaimana yang dimaksudkan untuk mengajak warga masyarakat miskin melihat dan menyadari permasalahan yang dihadapi, kemudian mendiskusikan bersama bagaimana cara mengatasi masalah tersebut untuk ikut terlibat di dalamnya (Haris, 2018).

Ife (2008) menyatakan pemberdayaan artinya meningkatkan kemampuan masyarakat dengan memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam dan mempengaruhi kehidupan dari masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti gotong royong, kerjasama, hormat kepada yang lebih tua, dan kearifan lokal lainnya sebagai jati diri masyarakat perlu ditumbuhkembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan (Anwas, 2019).

Salah satu program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh sektor pemerintah khususnya Kementerian Sosial RI adalah program KUBE. KUBE adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan PROKESOS untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya (Hermawati et al., 2015).

Pembentukan KUBE merupakan program pemberdayaan kelompok masyarakat/keluarga miskin melalui pemberian bantuan sosial usaha ekonomi produktif. Program KUBE sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Pemberian bantuan usaha untuk peningkatan ekonomi bagi keluarga kurang mampu agar dapat berusaha sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan.

Mekanisme untuk mendapatkan bantuan dengan membentuk satu kelompok berjumlah 10 orang berasal dari keluarga miskin, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Persyaratan untuk mendapatkan bantuan, terlebih dahulu kelompok mengajukan proposal yang diusulkan dari kelurahan/desa setempat dan mengajukan kebutuhan sesuai keterampilan yang dimiliki, melengkapi KTP serta bukti kartu miskin. Pembentukan KUBE sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia baik di kota maupun di desa. Keberadaan KUBE FM (Fakir Miskin) berhasil memperkokoh perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin (Hermawati et al., 2015). Konsep pemberdayaan masyarakat melalui program KUBE ini relevan dengan metode *social group work* dalam pekerjaan sosial. Mengubah perilaku individu melalui kelompok lebih efektif daripada upaya perubahan secara individual (Garvin & Galinsky, 2004).

Keberhasilan program KUBE untuk mencapai tujuan yang diharapkan tentu tidak akan terlepas dari keberhasilan implementasi kebijakan tersebut yang ditentukan oleh beberapa variabel, tema atau faktor yang saling berhubungan satu dengan yang lain (Subarsono, 2023). Tahap implementasi program adalah tahap pelaksanaan program itu sendiri. Dimana pada tahap ini terjadi perubahan proses

perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan (Suharto, 2017).

Terdapat beberapa teori implementasi kebijakan yang merinci variabel, tema, atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program atau kebijakan. Di antaranya teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang memuat enam tema yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni (1) standar dan kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) kondisi sosial ekonomi politik; (6) sikap para pelaksana (Subarsono, 2023); (Widodo, 2022); (Dewi, 2019); (Abdoellah, & Rusfiana, 2016); (Ravyansyah et al., 2022); (Tachjan, 2006); (Kasmad, 2013); (Subianto, 2020); (Maulana & Nugroho, 2019); (Kamal, 2019). Selain itu terdapat teori implementasi kebijakan menurut George Edwards III yang memuat 4 (empat) tema yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yakni (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi atau sikap pelaksana; (4) struktur birokrasi (Subarsono, 2023); (Widodo, 2022); (Dewi, 2019); (Abdoellah, & Rusfiana, 2016); (Ravyansyah et al., 2022); (Tachjan, 2006); (Kasmad, 2013); (Subianto, 2020); (Maulana & Nugroho, 2019); (Kamal, 2019). Selanjutnya, terdapat teori yang lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program oleh David C. Korten. Menurut Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program yaitu program itu sendiri, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran (*target group*). (Subarsono, 2023); (Maulana & Nugroho, 2019).

Konsep tentang implementasi atau pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di atas sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 2 menyebutkan bahwa penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Dilanjutkan pada pasal 3 huruf (e) bahwa fakir miskin berhak mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa pemberdayaan merupakan salah satu upaya dalam penanganan fakir miskin.

Pernyataan tersebut dipertegas kembali dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Hal ini juga merujuk pada program KUBE yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin, yaitu Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk,

tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Kabupaten Sumedang sebagai salah satu daerah yang mengimplementasikan program KUBE mengatur pelaksanaan program tersebut dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 116 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama. Dalam pasal 26 disebutkan bahwa anggaran bantuan modal UEP KUBE bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang melalui: (a) pos bantuan sosial program pengentasan kemiskinan; atau (b) belanja tidak terduga.

Berdasarkan tinjauan latar belakang di atas yang meliputi tema empiris, teoritis, dan yuridis, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama "Sumber Rezeki 1" dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Malaka Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang. Topik penelitian ini juga relevan dengan studi peneliti yaitu pekerjaan sosial. Dalam konteks pekerjaan sosial upaya penanggulangan masyarakat miskin dapat dilakukan melalui pemberdayaan. Pekerja sosial berusaha memberdayakan masyarakat miskin dengan membangun kemandirian mereka yang didasarkan pada potensi dan sumber daya yang dimiliki baik pada individu maupun lingkungannya (S. A. Pratiwi et al., 2022).

Model implementasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teori Implementasi George Edward III yang menyoroti empat tema krusial yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi program,

yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Peneliti memilih menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik Model George Edward III sebagai sandaran konseptual implementasi kebijakan dalam penelitian ini karena dianggap lebih komprehensif. Model George Edward III memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan secara lebih seimbang. Sementara itu, model Van Meter dan Van Horn lebih mekanis dan linier, dan model Korten lebih idealis dan jangka panjang, yang dapat membuat mereka kurang efektif dalam konteks yang memerlukan adaptasi cepat dan hasil yang terukur.

Teori Implementasi Kebijakan Publik pada Model George Edward III tersebut telah terbukti efektif dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program, termasuk tema komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Hidayat, 2017) ; (Zulkarnain et al., 2021). Dengan demikian, penggunaan teori ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif dan mendalam terkait faktor-faktor atau tema-tema yang memengaruhi keberhasilan implementasi Program KUBE "Sumber Rezeki 1" di Desa Malaka, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama “Sumber Rezeki 1” dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Malaka Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang?”. Selanjutnya pertanyaan penelitian tersebut diuraikan menjadi sub-sub perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan?

2. Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam implementasi program Kelompok Usaha Bersama “Sumber Rezeki 1” di Desa Malaka Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana pengalokasian sumber daya kepada Kelompok Usaha Bersama “Sumber Rezeki 1” untuk mendukung implementasi program Kelompok Usaha Bersama di Desa Malaka Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang?
4. Bagaimana disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam implementasi program Kelompok Usaha Bersama “Sumber Rezeki 1” di Desa Malaka Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang?
5. Bagaimana struktur birokrasi yang diterapkan dalam implementasi program program Kelompok Usaha Bersama “Sumber Rezeki 1” di Desa Malaka Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara empiris tentang:

1. Karakteristik informan.
2. Komunikasi yang dilakukan dalam implementasi program Kelompok Usaha Bersama “Sumber Rezeki 1” di Desa Malaka Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.
3. Pengalokasian sumber daya oleh Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dalam mendukung implementasi program Kelompok Usaha Bersama “Sumber Rezeki 1” di Desa Malaka Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.

4. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam implementasi program Kelompok Usaha Bersama “Sumber Rezeki 1” di Desa Malaka Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.
5. Struktur birokrasi yang diterapkan dalam implementasi program program Kelompok Usaha Bersama “Sumber Rezeki 1” di Desa Malaka Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang kesejahteraan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Memperoleh pemahaman lebih dalam tentang konsep pemberdayaan, terutama dalam konteks implementasi program KUBE sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.
2. Memperoleh pemahaman mengenai dinamika KUBE dalam konteks pemberdayaan masyarakat, termasuk faktor-faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat atau kendala dari keberhasilan program.
3. Menghubungkan dan melihat relevansi antara implementasi program Kelompok Usaha Bersama dalam pemberdayaan masyarakat dengan model implementasi kebijakan publik menurut George Edward III.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat di lapangan, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Malaka.
2. Memberikan dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dan pemangku kepentingan dalam membuat dan mengembangkan kebijakan dan program terkait pemberdayaan masyarakat.
3. Menjadi rujukan bagi masyarakat dan KUBE lain dalam mengembangkan KUBE untuk meningkatkan ketercapaian tujuan program yang mampu memberdayakan masyarakat khususnya anggota yang terlibat dalam kelompok tersebut.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : **PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : **KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat tentang penelitian terdahulu, teori yang relevan dengan penelitian, dan kerangka pemikiran
- BAB III** : **METODE PENELITIAN**, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data dan cara menentukannya, teknik pengumpulan data, pemeriksaan

keabsahan data, teknik analisis data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan yang terdiri dari analisa masalah, analisa masalah, dan analisa sumber.

BAB V : USULAN PROGRAM, memuat dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, sistem pelaksana, metode dan teknik pekerjaan sosial yang digunakan, langkah-langkah pelaksanaan program, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan dan indikator keberhasilan.

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN, memuat simpulan hasil penelitian dan program serta saran.